

**PENGETAHUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI
DI PEDUKUHAN TAMBAKBAYAN, CATURTUNGGAL, DEPOK
SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Program Sarjana Kesehatan Masyarakat



Oleh:

YUNITA PEDABILI

KM.20.00648

**PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA HUSADA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI
PENGETAHUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI
DI PEDUKUHAN TAMBAKBAYAN, CATURTUNGAL, DEPOK
SLEMAN

Disusun Oleh:

Yunita Peda Bili

KMP.2000648

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H.

Penguji I / Pembimbing Utama


Tedy Candra Lesmana, S.Hut., M. Kes.

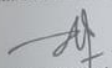
Penguji II / Pembimbing Pendamping


Sugiman, SE., M.P.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat

Yogyakarta, Agustus 2024

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1)


Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H.

**PENGETAHUAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI
DI PEDUKUHAN TAMBAKBAYAN, CATURTUNGGAL, DEPOK
SLEMAN**

Yunita Peda Bili¹, Tedy Candra Lesmana,² Sugiman³

INTISARI

Latar Belakang: Tingkat pengetahuan yang tinggi memiliki informasi yang baik mengenai pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh dari asuransi sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan keteraturan pembayaran iuran asuransi kesehatan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah akan cenderung tidak teratur dalam membayar iuran asuransi kesehatan karena kurangnya informasi mengenai pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh jika mengikuti asuransi serta tidak mengetahui akan adanya denda jika terlambat membayar iuran asuransi kesehatan (Latifah et al., 2020).

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan Tentang Sanksi Administratif dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri di Padukuhan Tambak Bayan, Caturtunggal.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *studi cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta BPJS kesehatan mandiri dengan jumlah populasi sebanyak 82 peserta BPJS kesehatan mandiri di Padukuhan Tambak Bayan, Kelurahan Caturtunggal, Depok Sleman. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik random sampling*, atau pengambilan sampel secara acak dan uji statistik menggunakan uji chi square.

Hasil: Pengetahuan peserta tentang sanksi administratif di Padukuhan Tambak Bayan Caturtunggal sebagian besar dalam kategori tinggi (91,1%) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri dalam kategori patuh (88,9%). Hasil *Uji chi square* menunjukkan bahwa nilai signifikansi $p = 0,003$

Kesimpulan: Ada hubungan pengetahuan peserta tentang sanksi administratif dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri di Padukuhan Tambak Bayan, Caturtunggal.

Kata kunci: Pengetahuan peserta tentang sanksi dan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri.

¹ Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

² Dosen STIKES Wira Husada Yogyakarta

³ Dosen STIKES Wira Husada Yogyakarta

KNOWLEDGE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS WITH COMPLIANCE TO PAY INDEPENDENT HEALTH BPJS CONTRIBUTIONS IN TAMBAKBAYAN HAMLET, CATURTUNGGAL, DEPOK SLEMAN

Yunita Peda Bili,¹ Tedy Candra Lesmana,² Sugiman³

ABSTRACT

Background: High knowledge level has good information about the importance of insurance and the benefits it provides obtained from insurance so as to increase awareness of the regularity of payment of health insurance contributions. Conversely, people with low knowledge will tend to be irregular in paying health insurance contributions due to lack of information about the importance of insurance and the benefits obtained if they take insurance and do not know that there will be fines if they are late in paying health insurance contributions (Latifah et al., 2020).

Research Objectives: To determine the relationship between knowledge about Administrative Sanctions and compliance with paying independent health BPJS contributions in Tambak Bayan Padukuhan, Caturtunggal.

Research Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional study design. The population in this study were independent health BPJS participants with a total population of 82 independent health BPJS participants in Tambak Bayan Padukuhan, Caturtunggal Village, Depok Sleman. The sampling technique in this study used random sampling techniques, or random sampling and statistical tests using the chi square test.

Results: Participants' knowledge about administrative sanctions in Tambak Bayan Caturtunggal village is mostly in the high category (89.1%) with compliance in paying independent health BPJS contributions in the non-compliant category (65.2%). The chi square test results show that the significance value of $p = 0.000$.

Conclusion: There is a relationship between participants' knowledge of administrative sanctions and compliance with paying independent health BPJS contributions in Tambak Bayan Village, Caturtunggal.

Keywords: Participants' knowledge about sanctions and compliance with paying independent health BPJS contributions.

¹ Students of Health Public (S1) Study Program STIKES Wira Husada Yogyakarta

² Lecturer STIKES Wira Husada Yogyakarta

³ Lecturer STIKES Wira Husada Yogyakarta

I. PENDAHULUAN

Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh seseorang yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Peserta yang telah mendapatkan informasi tentang kewajibannya sebagai peserta jaminan kesehatan cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk membayar iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibandingkan dengan peserta yang belum mendapatkan informasi tersebut. Dengan memiliki pengetahuan, seseorang dapat menilai apakah pembayaran iuran mereka memenuhi kewajiban dan menghindari sanksi atau denda yang dikenakan oleh BPJS. Peserta yang memiliki tingkat pengetahuan baik cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya asuransi dan manfaat yang diberikan, sehingga mereka lebih sadar untuk membayar iuran asuransi kesehatan secara rutin. Sebaliknya, peserta dengan pengetahuan rendah sering kali kurang teratur dalam pembayaran iuran asuransi kesehatan karena kurangnya informasi mengenai pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh, serta tidak mengetahui adanya denda jika mereka terlambat membayar iuran (Latifah et al., 2020).

Ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dapat berdampak bagi peserta maupun bagi pengelola BPJS Kesehatan bagi peserta dampaknya adalah terhambatnya pelayanan kesehatan karena status kepesertaan akan menjadi non aktif mulai dari bulan berikutnya setelah pembayaran terlambat akibatnya, penjaminan pelayanan kesehatan akan dihentikan sementara waktu. Sementara itu, bagi pengelola BPJS Kesehatan dampaknya adalah mengalami kerugian yang cukup besar. Kepatuhan mengacu pada tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau ketentuan tertentu. Dalam konteks pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, pemahaman mengenai kepribadian seseorang melibatkan penilaian terhadap kemauan dan kemampuan mereka untuk membayar iuran secara tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menghadapi defisit setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa defisit BPJS

Kesehatan mencapai Rp8,5 triliun pada tahun 2014, Rp10,67 triliun pada tahun 2015, Rp11,55 triliun pada tahun 2016, Rp16,62 triliun pada tahun 2017, dan Rp10,98 triliun pada tahun 2018. Defisit ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat kolektibilitas iuran. Pada tahun 2018, tingkat kolektibilitas iuran JKN untuk peserta mandiri atau peserta PBPU di Indonesia masih kurang optimal, yaitu hanya 54%. Masalah ini timbul karena banyak peserta mandiri yang tidak pembayaran iuran JKN secara teratur (Jihan Adani, Pulungan et al., 2019). Fokus pemerintah Indonesia terhadap kesehatan dibuktikan dengan diterbitkannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini, Pemerintah pusat menetapkan target cakupan kesehatan universal sebesar 95% pada tahun 2019. Sehingga akhir tahun 2019, target tersebut belum tercapai. Selain belum tercapainya Universal Health Coverage, permasalahan lain muncul ketika BPJS Kesehatan kerap terlilit utang dan terlambat membayarkan biaya pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan/Fasilitas Kesehatan (Ma'ruf, 2019). Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mencatat bahwa sekitar 12 juta peserta JKN mengalami keterlambatan dalam membayar iuran kepesertaan. Angka itu sekitar 24% dari total peserta mandiri jaminan kesehatan nasional dan sebanyak 323 penunggak di tahun 2018 (*BPJS Kesehatan, 2020*). Untuk mengatasi defisit tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan baru untuk meningkatkan jumlah iuran, yang memicu berbagai reaksi dari para pemangku kepentingan, terutama dari peserta mandiri (*Mentari, 2023*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta BPJS kesehatan mandiri di Pedukuhan Tambak Bayan, Kelurahan Caturtunggal, Depok Sleman sebanyak 82. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, atau pengambilan sampel secara acak sebanyak 45 responden. Alat yang digunakan kuesioner. Data diolah dan dianalisis menggunakan Uji Chi Square

III. HASIL

Tabel 1
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan umur

No	Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Jenis kelamin		
	Laki-laki	23	51,1
	Wanita	22	48,9
	Total	45	100
2.	Umur		
	30-48	15	33,3
	50-58	14	31,1
	60-65	16	35,6
	Total	45	100

(Sumber: Data primer diolah 2024)

Berdasarkan data, mayoritas responden adalah pria, dengan total 23 orang (51,10%), sementara wanita berjumlah 22 orang (48,90%). Untuk kelompok usia, sebagian besar responden berada dalam rentang 60-65 tahun, dengan jumlah 16 orang (35,6%).

Tabel 2.
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan pendapatan keluarga

No	Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Pendidikan terakhir		
	SD	4	8,9
	SMP/SMA	12	26,7
	SLTP	4	8,9
	S1	25	55,6
	Total	45	100
2.	Pendapatan Keluarga		
	<RP.500.000- 1.000.000 per bulan	24	53,3
	≥2.000.000- 3.000.000 per bulan	21	46,7
	Total	45	100

(Sumber:data primer diolah 2024)

Dari data yang diperoleh, terdapat 25 responden (55,6%) dengan tingkat pendidikan tinggi. Selain itu, 24 responden (53,3%) memiliki pendapatan bulanan antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, sedangkan 21 responden

(46,7%) memiliki pendapatan bulanan antara Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000.

Tabel 3.

Distribusi Responden Berdasarkan Kelas_BPJS_Kesehatan

No	Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Kelas BPJS kesehatan		
	Kelas 1	20	44,4
	Kelas 2	15	33,3
	Kelas 3	10	22,2
	Total	45	100

(Sumber: data primer diolah 2024)

Dapat diamati bahwa, berdasarkan kelas perawatan, mayoritas responden adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 1, sebanyak 20 orang (44,4%), sementara yang berada di kelas 3 berjumlah 10 orang (22,2%).

Analisis Univariat

Hasil analisis univariat dari dua variabel dalam penelitian ini adalah, pengetahuan peserta BPJS kesehatan mandiri mengenai sanksi administratif dan kepatuhan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Responden Tentang Sanksi

Administratif

No	Variabel	Frekuensi	%
1.	Pengetahuan		
	Tinggi	41	91,1
	Rendah	4	8,9
	Total	45	100
2.	kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan		
	Patuh	40	88,9
	Kurang patuh	5	11,1
	Total	45	100

(Sumber: data primer diolah 2024)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan tinggi mengenai sanksi administratif, yaitu sebanyak 41 orang (91,1%), sementara 4 responden (8,9%) memiliki pengetahuan rendah. Selain itu, mayoritas responden menunjukkan ketidakpatuhan dalam membayar iuran, dengan 5 orang (11,1%) tidak patuh, sementara 40 responden (88,9%) tercatat patuh dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri.

Analisis Bivariat

Tabel 8.

Analisis Bivariat Mengenai Tingkat Pengetahuan Peserta Tentang Sanksi Administratif dan Kepatuhan dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Pengetahuan	Kepatuhan dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri						<i>P-value</i>
	Patuh		Kurang Patuh		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Tinggi	38	36,4	3	4,6	41	92,7	0,003
Rendah	2	3,6	2	3,6	4	7,3	
Total	40	32,8	5	1,0	45	100	

(sumber: data primer dilah 2024)

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa dari 38 responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, terdapat 3 orang (4,6%) yang kurang patuh dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan Mandiri. Hasil uji statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan $p=0,003$, yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan peserta tentang sanksi administratif dan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan

V. PEMBAHASAN

Pengetahuan Tentang Sanksi Administratif Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden terkait pengetahuan tentang sanksi administratif menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan tinggi, yaitu 41 orang (89,1%), sedangkan hanya 4 orang (8,7%) yang memiliki pengetahuan rendah. Meskipun sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang tinggi, banyak dari mereka tidak mematuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosmanely (2018), yang mengungkapkan bahwa dari 102 responden dengan tingkat pengetahuan baik, 89,2% tidak patuh dalam membayar iuran, sedangkan 10,8% dari mereka dengan pengetahuan kurang, lebih patuh dalam membayar iuran. Pengetahuan mencakup seluruh informasi yang diketahui seseorang. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dari penelitian (Mokolomban) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pendidikan seseorang dan kepatuhan membayar iuran JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru. Peserta JKN dengan pendidikan rendah seringkali menganggap kesehatan lebih penting dan percaya bahwa program JKN akan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Sebaliknya, peserta dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara melalui pembayaran iuran. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya membayar iuran, sedangkan mereka yang berpendidikan rendah mungkin kurang termotivasi untuk membayar iuran karena pemahaman yang kurang mendalam.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari aktivitas masyarakat setiap bulan, yang disesuaikan dengan standar upah minimum per individu di suatu daerah. Teori Gunistiyo pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk berasuransi dan membayar premi (Gunistiyo, 2006). Pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaan yang dimilikinya (Sukirno, 2016).

Di Yogyakarta, dengan UMR atau UMK sebesar Rp 2.315.976,39, pendapatan menunjukkan bahwa mereka yang pendapatannya berada di bawah UMK cenderung lebih patuh dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan Mandiri, karena mereka memahami kesehatan sebagai kebutuhan esensial yang harus diprioritaskan. Namun, masyarakat dengan pendapatan di bawah UMK dan yang kurang patuh membayar iuran sering mengalami masalah karena prioritas kebutuhan keluarga lain, sehingga anggaran untuk membayar iuran menjadi tidak mencukupi.

Berdasarkan gambaran bahwa karakteristik responden yang memiliki pendidikan tinggi sebanyak 25 orang (55,6%) dan dapat diketahui bahwa karakteristik yang memiliki tingkat pendapatan sebesar Rp 2.000.000 - 3.000.000 per bulan yaitu sebanyak 21 responden (46,7) dan tingkat pendapatan Rp 5.000.00 - 1.000.000 per bulan terdapat 24 orang (53,3%). Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa ketika pendapatan meningkat atau proporsi anggota rumah tangga yang menganggur menurun, masyarakat bersedia membayar premi asuransi kesehatan yang lebih tinggi. Meningkatnya pendapatan meningkatkan kemampuan membayar harga yang semakin tinggi, kemampuan mengendalikan sumber daya dalam menghadapi resiko biaya pengobatan bila sakit, semakin besar pula kemauan konsumen untuk membayar.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulandari et al. (2020), yang mengidentifikasi hubungan antara pendapatan dan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri, serta konsisten dengan penelitian Agustina et al. (2019), yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berkaitan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar premi (Agustina, Z. A., & Izza, 2019).

Sebagian besar masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung kurang disiplin dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara itu, meskipun masyarakat dengan pendapatan cukup sering kali kurang patuh dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional, Ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan hidup. Masyarakat dengan pendapatan rendah sering kali tidak memprioritaskan biaya kesehatan karena merasa dalam keadaan sehat. Sebaliknya, individu dengan pendapatan tinggi umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik untuk membayar iuran JKN. Bagi pekerja di sektor informal, kepatuhan dalam membayar iuran JKN sering kali terganggu oleh fluktuasi pendapatan dan kebutuhan yang tidak menentu. Ketidakpastian pendapatan di sektor informal seringkali tidak sejalan dengan kewajiban rutin pembayaran JKN setiap bulan. Penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa pekerja dengan upah harian cenderung lebih rutin membayar iuran asuransi kesehatan dibandingkan pekerja dengan upah mingguan atau bulanan, karena mereka lebih siap dalam hal pembayaran. Ketidakpastian pendapatan dapat menyebabkan masalah tambahan terkait pembayaran iuran, seperti lupa membayar dan kesulitan dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran iuran JKN yang mengharuskan pembayaran rutin setiap bulan serta pelunasan tunggakan menjadi kendala bagi pekerja informal untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka yang nonaktif akibat akumulasi tunggakan (Tsuroyya & Maharani, 2023).

Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Dengan Tingkat Pengetahuan Peserta Tentang Sanksi Administratif

Pengetahuan adalah salah satu faktor yang memengaruhi perilaku peserta dalam pembayaran iuran. Kurangnya pengetahuan tentang iuran dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran secara teratur. Sebaliknya, pengetahuan yang baik memungkinkan peserta membuat keputusan yang lebih tepat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil kuesioner, 41 responden (91,1%) menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang baik dan konsisten pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Sebaliknya, 4 responden (8,9%) dengan pengetahuan yang kurang cenderung tidak patuh pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri, karena mereka lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji chi-square, diperoleh nilai p sebesar 0,003. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. dimana proporsi responden yang kurang patuh dalam pembayaran iuran sebesar 65,2% dibandingkan dengan pengetahuan sangat tinggi mencapai 89,1% yang berarti responden yang memiliki pengetahuan tinggi dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran iuran. Penelitian ini konsisten dengan studi Fitasari 2018 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mematuhi pembayaran iuran, dengan 70 responden (53,8%) tidak patuh, sementara 60 responden (46,2%) mematuhi kewajiban pembayaran iuran di Kelurahan Kedamangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nur Aziza

Ramadani, Haeruddin, & Batara, 2021) mengidentifikasi adanya hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada peserta di Kecamatan Bontomatene, dengan nilai p sebesar 0,712. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nur Aziza Ramadani (2021) yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan pengetahuan tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya asuransi dan manfaatnya, sehingga mereka lebih cenderung membayar iuran secara teratur. Sebaliknya, masyarakat dengan pengetahuan rendah lebih cenderung tidak teratur dalam membayar iuran karena kurangnya informasi tentang pentingnya asuransi dan denda keterlambatan. Namun penelitian ini berbeda dari studi yang dilakukan (Murniasih et al., 2022) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu, dengan nilai p sebesar 0,709%.

Kepatuhan pembayaran Iuran BPJS Dengan Tingkat Pengetahuan Peserta Mengenai Sanksi Administratif

Berdasarkan hasil kuesioner, 40 responden (88,9%) melaporkan bahwa mereka secara rutin pembayaran premi BPJS Kesehatan Mandiri. Sebaliknya, 5 responden (11,1%) tidak mematuhi dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan Mandiri alasannya lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. Analisis statistik menunjukkan bahwa responden yang patuh dalam membayar iuran umumnya berasal dari kelompok dengan pengetahuan tinggi, dengan nilai $p = 0,003$. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Temuan ini konsisten dengan penelitian Chaerunisa, yang menunjukkan bahwa pengetahuan mempengaruhi kepatuhan dengan nilai $p = 0,000$. Dalam

penelitian tersebut, peserta dengan pengetahuan baik memiliki kemungkinan 7,059 kali lebih besar untuk patuh dibandingkan mereka yang memiliki pengetahuan rendah. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian (Noor Latifah A & Fajrini.) juga mendukung hasil ini, menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam pembayaran premi BPJS Mandiri, dengan nilai $p = 0,023$.

Data yang diolah menunjukkan bahwa beberapa alasan ketidakpatuhan peserta Badan penyelenggara jaminan kesehatan terkait dengan pembayaran iuran meliputi penghasilan yang tidak menentu, ketidakpuasan dengan pelayanan dari badan asuransi atau fasilitas kesehatan, kesibukan, serta alasan pribadi seperti tidak sering sakit dan memilih untuk membeli obat di warung (BPJS Kesehatan, 2017). Sejalan dengan penelitian oleh (Imron et al., 2023), Ketidakpatuhan dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan mandiri sering kali disebabkan oleh penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga alokasi dana untuk iuran menjadi terbatas. Pengetahuan individu mempengaruhi keputusan mereka tentang apakah mematuhi pembayaran premi dapat menghindarkan mereka dari sanksi atau denda BPJS. Individu dengan pengetahuan baik umumnya memiliki informasi yang lebih bagus tentang pentingnya asuransi dan manfaatnya, yang membuat mereka lebih sadar dan teratur dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya, individu dengan pengetahuan rendah cenderung kurang konsisten dalam pembayaran premi karena kurangnya informasi tentang manfaat asuransi dan adanya denda keterlambatan pembayaran. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Fajrini et al., 2021) yang menyatakan bahwa dari 102 responden dengan pengetahuan baik, 89,2% tidak patuh membayar iuran, sementara 10,8% dari mereka dengan pengetahuan kurang menunjukkan kepatuhan lebih tinggi. Pengetahuan, yang mencakup semua informasi yang dimiliki seseorang, berperan penting dalam kepatuhan pembayaran iuran. Penelitian oleh Fitasari (2018) juga menunjukkan bahwa di Desa Kedamangan, sebagian besar responden tidak patuh membayar iuran, dengan 70 orang (53,8%) tidak mematuhi pembayaran premi dan 60 responden (46,2%) patuh. Penelitian Mario Suharni dan Muhammad Khidri

Alwi (2022) di Puskesmas Rappokalling, Kota Makassar, mengungkapkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang BPJS dan kemauan untuk membayar iuran. Penelitian yang dilakukan oleh (Jihan, 2021) yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang Jaminan kesehatan nasional dan hasil analisa menggunakan uji chi-square dengan nilai $p=0,019$.

VI . KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Pengetahuan tentang sanksi administratif dan kepatuhan pembayaran Iuran BPJS kesehatan Mandiri di pedukuhan tambakbayan, caturtunggal, depok sleman. Dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengetahuan tentang sanksi administratif pada kategori tinggi 91,1 %. sedangkan pada kategori rendah 8,7%.
- 2) Dalam hal kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan, 88,9% responden berada dalam kategori patuh, sedangkan 11,1% berada dalam kategori kurang patuh.
- 3) Ada hubungan signifikan antara pengetahuan mengenai sanksi administratif dan tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dengan nilai p sebesar 0,037

SARAN

- 1) Bagi masyarakat Tambakbayan Caturtunggal Depok Sleman
Diharapkan dapat meningkatkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri secara rutin agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
- 2.) Untuk Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama dalam bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK), dengan fokus pada kepatuhan peserta dalam pembayaran iuran di Dusun Tambakbayan.

2) Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Selain itu, diharapkan penelitian berikutnya dapat mencakup dan mengembangkan variabel-variabel yang belum diteliti dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Imron, I. Al, Sutaip, & Abdurochman. (2023). Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri. *Journal of Midwifery and Health Administration Research*, 3(2), 141–148.
- 2) jihan 2019. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bpjs Mandiri Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Thesis, Universitas Hasanuddin*.
- 3) Latifah, N., Nabila, W., & Fajrini, F. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 16(2), 84. <https://doi.org/10.24853/jkk.16.2.84-92>
- 4) Hj. Sumaryatin, S.Sos., 2019) <https://sumaryatin.com/opini/ini-dia-akar-solusi-bpjs-kesehatan/>